

DESAIN KURIKULUM JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN SEBAGAI PROGRAM EDUKASI KEBIJAKAN PUBLIK DI BIDANG PENDIDIKAN¹

Priadi Surya, M.Pd.
Dosen Tetap Jurusan Administrasi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
Email: priadisurya@uny.ac.id

Abstrak

Jurusan Administrasi Pendidikan bertugas mengembangkan ilmu administrasi pendidikan yang berlandaskan filosofi dan budaya Indonesia dan mengembangkan praksis administrasi pendidikan yang berwawasan global. Lulusannya dipersiapkan menjadi administrator yang berperan sebagai perumus, pelaksana, dan analis kebijakan publik di bidang pendidikan. Untuk itu, perlu adanya desain kurikulum sebagai medium program edukasi kebijakan publik di bidang pendidikan berciri khas Indonesia dan berwawasan global. Kurikulum dipandang sebagai perangkat pembelajaran yang terdiri atas filosofi keilmuan, materi, metode, media dan evaluasi pembelajaran. Komunikasi efektif perkuliahan, hubungan interpersonal civitas akademika dan *stakeholders relation* sangat dibutuhkan untuk melaksanakan program pendidikan perguruan tinggi. Desain kurikulum yang berlandaskan filsafat keilmuan administrasi pendidikan, filsafat dasar negara Indonesia, dan wawasan global menjadi syarat utama dalam program edukasi kebijakan publik di bidang pendidikan. Dosen dituntut memiliki keterampilan komunikasi yang baik sehingga pembelajaran yang dijalankan efektif. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelaahan menunjukkan adanya pengomunikasian kebijakan pendidikan yang dilakukan dosen dalam perkuliahan dalam bentuk ceramah, diskusi kelas, diskusi kelompok, seminar, praktik dan observasi lapangan.

Kata kunci: administrasi pendidikan, kebijakan publik, kebijakan pendidikan, desain kurikulum, komunikasi.

¹ Disampaikan dalam Konferensi Nasional Komunikasi, Departemen Komunikasi FISIP UI Depok 9-10 November 2011 dan dimuat dalam Proceeding Konferensi Nasional Komunikasi "Membumikan Ilmu Komunikasi di Indonesia". ISBN: 978-602019283-0-1 halaman 575-587

Pendahuluan

Komunikasi kebijakan publik merupakan kajian yang jarang sekali dibahas, bahkan jarang sekali topik seperti ini diangkat dalam suatu penelitian akademis. Padahal kalau kita cermati mengkomunikasikan suatu kebijakan publik bukanlah hal yang mudah dan memerlukan strategi dan program komunikasi yang tepat. Untuk mengkomunikasikan kebijakan publik harus ada prakondisi, dan sering dibutuhkan pendekatan *issue management*. (Dian Umar, 2011). Berbagai kebijakan publik sering kita jumpai kurang bisa dipahami oleh masyarakat luas. Begitu pula kebijakan publik bidang pendidikan harus lebih diefektifkan penyampaiannya. Penulis mencoba menelaah komunikasi kebijakan publik bidang pendidikan melalui pendidikan di Jurusan Administrasi Pendidikan.

Komunikasi kebijakan publik bidang pendidikan melalui pendidikan di Jurusan Administrasi Pendidikan memiliki peran strategis. Pertama, sebagai sosialisasi kebijakan pendidikan bagi masyarakat, khususnya mahasiswa calon administrator pendidikan. Kedua, sebagai bahan kajian akademik sesuai dengan bidang keilmuan Jurusan Administrasi Pendidikan. Kebijakan pendidikan tersebut menjadi sesuatu hal yang senantiasa dipelajari, dikritisi, dan disempurnakan. Ketiga, Jurusan Administrasi Pendidikan berkewajiban memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat, khususnya *stakeholders* pendidikan dengan memberikan pemahaman atas kebijakan pendidikan dengan disertai saran dan kritik dari sudut pandang keilmuan.

Jurusan Administrasi Pendidikan bertanggung jawab menyiapkan lulusan yang setelah menyandang gelar Sarjana Pendidikan dalam Program Studi Manajemen Pendidikan, mampu memahami kebijakan publik bidang pendidikan secara mendalam. Kemampuan merumuskan, menerapkan, dan menganalisis kebijakan pendidikan menjadi kewajiban bagi alumni Jurusan Administrasi Pendidikan. Harapannya, dengan disertai pola pikir ilmiah dalam keilmuannya, ketika mereka bekerja di masyarakat dapat dengan kritis menyikapi kebijakan pendidikan.

Kajian Teoritis

Desain Kurikulum

Desain kurikulum (*curriculum design*) merupakan subteori dari teori kurikulum, di samping rekayasa kurikulum (*curriculum engineering*). Nana Syaodih Sukmadinata dan R. Ibrahim (2007: 100) mengemukakan bahwa desain kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang akan diikuti siswa pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum akan tergambar unsur-unsur dari kurikulum, hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya, prinsip-prinsip pengorganisasian, serta hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Desain kurikulum memuat dua dimensi penting, yaitu pertama, substansi, unsur-unsur serta organisasi dari dokumen tertulis kurikulum, dan kedua, model pengorganisasian dan bagian-bagian kurikulum terutama organisasi dan proses pengajaran. Hal lain yang perlu ditambahkan dalam desain kurikulum adalah ketentuan-ketentuan tentang bagaimana penggunaan kurikulum, serta bagaimana mengadakan penyempurnaan-penyempurnaan berdasarkan masukan dari pengalaman. Lalu kurikulum itu dievaluasi, baik bentuk desainnya maupun sistem pelaksanaannya.

Pengembangan kurikulum di perguruan tinggi memenuhi langkah desain instruksional, penyusunan silabus dan rencana perkuliahan. Pada umumnya silabus memuat tema dan subtema yang akan disampaikan dalam perkuliahan. Sedangkan rencana perkuliahan yang dikenal dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) atau juga Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP), memuat gambaran kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam desain pembelajaran ini dilandasi oleh teori psikologi, teori komunikasi, teori sistem dan teori manajemen. Perencanaan proses pembelajaran meliputi Silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. (Mukminan, 2010).

Komunikasi Kebijakan Publik melalui Pendidikan

Pemerintah mencanangkan program pendidikan nasional dengan menerapkan kebijakan publik sebagai pengawal tercapainya cerdasnya kehidupan bangsa. Kebijakan publik seringkali tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi dari kebijakan publik tersebut seringkali dikomunikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan pendidikan. Kegiatan mengomunikasikan kebijakan pendidikan oleh pemerintah ini disebut sebagai komunikasi kebijakan pendidikan. Komunikasi kebijakan pendidikan yang berasaskan pembangunan sumber daya manusia pada saat ini telah berkembang dengan berbagai model dengan berbagai pendekatan, diantaranya adalah (1) pendekatan skala luas dengan penggunaan media massa. Model ini dibatasi khusus oleh variabel ekonomi; (2) Pendekatan yang mempromosikan komunikasi akar rumput atau komunitas; dan (3) Model baru yang menekankan pada dimensi luas dari pembangunan yang memungkinkan mendefinisikan sebagai proses global. (Udi Rosadi, 2010: 7).

Udi Rosadi (2007: 8) mengemukakan model komunikasi pembangunan dapat dilihat dari tiga bentuk yang berbeda. Tiga model komunikasi pembangunan tersebut adalah (1) *development communication* yang dikemukakan oleh Lerner, Pye dan Schramm; (2) *development support communication* yang dikemukakan oleh UNDP; dan (3) *development as discourse practice*. Penulis berpandangan bahwa komunikasi kebijakan publik bidang pendidikan melalui pendidikan di Jurusan Administrasi Pendidikan dapat menerapkan model-model tersebut.

Yoyon Bahtiar Irianto (2011: 38) mengemukakan dalam aspek proses komunikasi kebijakan akan berkenaan dengan aspek pelaku kebijakan, pengetahuan, dokumen-dokumen dan presentasi. Pelaku kebijakan menyusun agenda, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Pengetahuan mencakup aspek masalah, masa depan, aksi, hasil, dan kinerja kebijakan. Dokumen berbentuk memorandum, isu-isu strategis, ringkasan eksekutif, apendik dan berita. Presentasi dapat dilakukan dengan percakapan, konferensi, pertemuan, *briefing*, dan dengar pendapat.

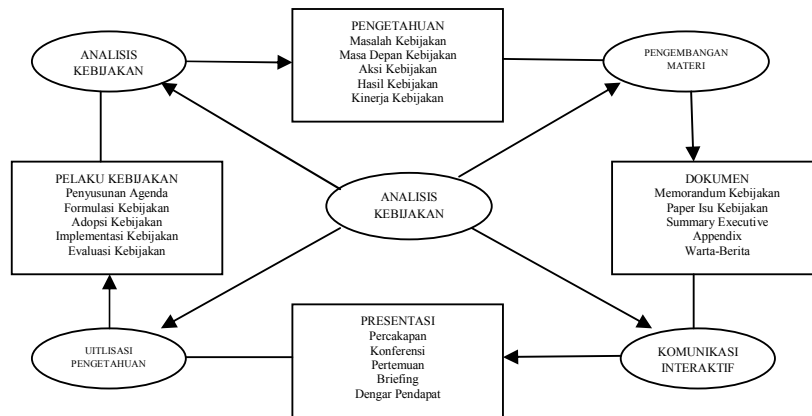


Diagram 1
 Proses Komunikasi Kebijakan
 (William N. Dunn, 1994., Yoyon B. Irianto, 2011)

Mengomunikasikan kebijakan publik bidang pendidikan melalui pengajaran didasarkan atas teori mengajar pada pendidikan interaksional. Manusia sebagai makhluk sosial yang secara alamiah membutuhkan manusia lain untuk bekerja sama, berinteraksi, bekerja, dan hidup satu sama lain. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan untuk bekerja dan interaksi. Asep Heri Hermawan, et al (2007: 61) mengemukakan bahwa pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak atau multi pihak, yaitu guru, siswa dan lingkungannya sehingga terjadi hubungan dialogis dan interaksional. Dalam proses belajarnya, model interaksional terjadi melalui dialog. Dosen berperan dalam menciptakan dialog dengan dasar saling mempercayai dan saling membantu. Bahan ajar banyak diambil dari lingkungan, termasuk kebijakan publik bidang pendidikan. Mahasiswa dilibatkan dalam menghayati nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Pendidikan interaksional ini menekankan isi dan proses pendidikan sekaligus. Proses pendidikan ini berbantuan kegiatan belajar berkelompok yang mengutamakan kerja sama dan interaksi siswa dengan guru dan lingkungannya termasuk sumber belajar.

Pendidikan interaksional ini tentu saja erat kaitannya dengan teori dan proses komunikasi. Mengacu kepada Asep Heri Hermawan, et al (2007: 61) bahwa interaksional pada dasarnya berkaitan erat dengan teori dan proses komunikasi. Komunikasi suatu proses di mana partisipan berbagi informasi untuk mencapai pengertian satu sama lain. Dalam mengkomunikasikan kebijakan publik bidang pendidikan dalam pembelajaran, seperti halnya difusi kebijakan. Difusi adalah proses komunikasi untuk menyebarluaskan gagasan, ide, karya, dan dalam hal ini kebijakan sebagai suatu produk inovasi, maka aspek komunikasi menjadi sangat penting dalam menyebarluaskan kebijakan tersebut. Pendidikan, khususnya di Jurusan Administrasi Pendidikan menjadi saluran komunikasi dalam rangka program edukasi kebijakan publik bidang pendidikan di Indonesia. Lawrence Kincaid (Hermawan, 2007: 62) menulis model komunikasi konvergen yang bercirikan adanya beberapa komponen utama, yaitu informasi, ketidakmenentuan, konvergen, saling pengertian, saling menyetujui, kegiatan bersama, dan hubungan jaringan. Komunikasi merupakan proses konvergen di mana terjadi pembagian informasi bersama untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Proses komunikasi tersebut akan sangat mempengaruhi proses komunikasi kebijakan yang dilakukan.

Dalam pembelajaran, komunikasi yang dijalin lebih kepada komunikasi interpersonal. Komunikasi antara dosen dan mahasiswa, serta sesama mahasiswa. Mengomunikasikan kebijakan pendidikan memuat beberapa hal inti,

yaitu penyampaian informasi, penyampaian gagasan, dan penciptaan arti terkait kebijakan tersebut. (Ghufran, 2010). Faktor penentu keberhasilan pengomunikasian kebijakan pendidikan dalam pembelajaran meliputi faktor komunikator, pesan, komunikan, konteks, dan sistem penyampaian. Karenanya, pembelajaran dimaksudkan untuk merangsang mahasiswa untuk mengungkapkan dan menjelaskan perasaannya atas sesuatu kebijakan, serta mendorong mahasiswa untuk memilih perilaku alternatif atas kebijakan tersebut. Harapan yang hendak diwujudkan komunikasi dalam pembelajaran ini adalah adanya ketercapaian tujuan, respek antara dosen dan mahasiswa, keadilan dalam mendapatkan layanan pendidikan, keamanan dalam proses pembelajaran, dan perhatian yang penuh atas kebijakan pendidikan sebagai materi pembelajaran. Sudah seyogianya komunikasi ini erat kaitannya dengan keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki dosen, yaitu keterampilan bertanya, member penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, dan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keseluruhan keterampilan dasar mengajar itu merupakan kesatuan yang utuh dan terintegrasi.

Metodologi Penelitian

Metode Penelaahan

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Sugiyono (2006: 11) menerangkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. James H. McMillan dan Sally Schumacher (2001: 451) mengemukakan bahwa studi dokumentasi merupakan strategi tidak langsung untuk memperoleh data kualitatif. Pencermatan terhadap dokumen merupakan manifestasi yang terukur dan menjelaskan pengalaman, pengetahuan, kegiatan, dan nilai-nilai seseorang atau lembaga. Dokumen yang dijadikan sumber data dalam paparan ini adalah dokumen resmi (*official document*) terdiri atas kurikulum Jurusan Administrasi Pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2002 dan 2009, silabus dan rencana pengajarannya. Langkah-langkah pencermatan dokumen ini adalah pencarian dokumen, identifikasi dokumen, analisis dokumen, kritisasi dokumen, dan interpretasi makna dokumen.

Fokus Penelaahan

1. Filosofi kurikulum Jurusan Administrasi Pendidikan.
2. Kebijakan publik bidang pendidikan menjadi landasan bagi desain kurikulum Jurusan Administrasi Pendidikan.
3. Pengomunikasian kebijakan publik bidang pendidikan melalui pengajaran.

Hasil Analisis

Filosofi Kurikulum Jurusan Administrasi Pendidikan

Kurikulum 2002 didesain berbasiskan kompetensi yang diartikan sebagai kemampuan, kecakapan, keahlian. Dalam makna ini ada *core competency* dan ada *pendukung*, tetapi tidak dibeda-bedakan, sehingga menjadi satu

kesatuan yang utuh. Pada masa ini, kurikulum program studi administrasi pendidikan berada pada masa peralihan dari orientasi pada masa lalu di mana program studi ini, pertama, menyiapkan pengajar mata pelajaran Administrasi dan Supervisi Pendidikan di SPG. Kedua, orientasi pada kegiatan-kegiatan administrasi pendidikan di sekolah, dan ketiga, kegiatan supervisonal. Orientasi ini ditinggalkan karena calon mahasiswa program studi ini tidak disiapkan sebagai calon guru pengajar di sekolah dan jabatan kepala seklah dan pengawas/penilik (supervisor) hanya bisa dipegang oleh mereka yang sudah menjadi guru (berasal dari guru). Kurikulum Program Studi Administrasi Pendidikan tahun 2002 mengorientasikan pendidikan prajabatan untuk, pertama, mengarah ke yang lebih luas dan umum, mencakup berbagai kegiatan penyelenggaraan, pengelolaan, manajerial pendidikan yang ada di dalam masyarakat. Hal ini mencakup pengetahuan mengenai administrasi pendidikan di sekolah. Kedua, kendati bersebutan “manajerial pendidikan”, tidak berarti berorientasi pada pembinaan “top manajer”, melainkan mencakup sisi-sisi yang teknis manajerial yang bisa dilakukan “staf”, dengan penguatan pada aspek-aspek manajerial yang spesifik yang bisa dilakukan oleh staf (identik dengan program studi manajemen perusahaan yang juga tidak berarti akan membina calon top manajer). Ketiga, kegiatan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu aspek kompetensi yang mendapatkan perhatian, agar lulusan peka terhadap dinamika perkembangan sistem dan penyelenggaraan pendidikan dan kreatif inovatif untuk mengembangkannya ke yang lebih baik.

Tabel 1
Mata Kuliah Inti Program Program Studi Administrasi Pendidikan berdasarkan Kurikulum 2002

No.	Nama Mata Kuliah	sks Teori	sks Praktik	sks Lapangan
1	Dasar-dasar Manajemen Pendidikan	2		
2	Organisasi Pendidikan	2		
3	Penulisan Karya Ilmiah	1	1	
4	Aplikasi Komputer		4	
5	Teori dan Pendekatan Sistem	2		
6	Pengembangan SDM	2		
7	Ekonomi Pendidikan	2		
8	Komunikasi Organisasi Pendidikan	2		
9	Manajemen Kantor Lembaga Pendidikan	2		
10	Manajemen Peserta Didik	2		
11	Manajemen Kurikulum	2		
12	Manajemen Tenaga Kependidikan	2		
13	Manajemen Sumber Dana Pendidikan	2		
14	Manajemen Fasilitas Pendidikan	2		
15	Manajemen Hubungan Organisasi Pendidikan dengan Masyarakat	1	1	
16	Perencanaan Pendidikan	2		
17	Landasan Sosio-psikologi Manajemen Pendidikan	4		
18	Landasan Filsafat Manajemen Pendidikan	2		
19	Perencanaan Pendidikan Mikro	1	1	
20	Manajemen Pendidikan Usia Dini	1	1	
21	Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah	2		
22	Manajemen Pendidikan Tinggi	2		
23	Manajemen Pendidikan Luar Sekolah	2		
24	Manajemen Pendidikan Luar Biasa	2		
25	Manajemen Perpustakaan	1	1	
26	Kepemimpinan Pendidikan	2	1	
27	Sistem Informasi Manajemen	1	1	
28	Praktik Manajemen Perpustakaan			2
29	Praktik Perencanaan Pendidikan		2	
30	Manajemen Training	2	1	
31	Pengambilan Keputusan	2		
32	Manajemen Proyek	1	1	
33	Pengawasan Pendidikan	2		
34	Supervisi Pendidikan	2		
35	Penelitian dan Pengembangan Manajemen Pendidikan	2	1	
36	Analisis Data Manajemen Pendidikan	2	1	
37	Pendidikan Makro	2		
38	Analisis Kebijakan Pendidikan	2		
39	Evaluasi Program Pendidikan	2		
40	Manajemen Mutu Terpadu	2		
41	Kapita Selektta Manajemen Pendidikan	2		
42	Seminar Pengembangan Manajemen Pendidikan	2	3	
43	Observasi Lapangan Manajemen Pendidikan			1

Karakteristik dan kompetensi lulusan Program Studi sarjana (S1) Administrasi Pendidikan menurut kurikulum 2002 ini adalah sebagai: (1) pengelola pendidikan mencakup perencana, penyelenggara, spesialis penilaian (evaluator), peneliti, pengembang kurikulum, dan pengawas pendidikan, (2) tenaga penunjang pendidikan mencakup pustakawan pendidikan, teknisi, laboran, fasilitator, tata usaha sekolah, dan jenis lain yang serupa. Namun demikian tidak menutup kemungkinan lulusannya dapat menjadi tenaga pendidik terutama dosen dan widyaiswara.

Memperhatikan desain kurikulum 2002 bagi Program Studi Administrasi Pendidikan, nampak terdapat ketidakkonsistenan antara filosofi awal bahwa kurikulum dirancang dengan melihat calon mahasiswa program studi ini tidak disiapkan sebagai calon guru pengajar di sekolah dan jabatan kepala sekolah dan pengawas/penilik (supervisor) hanya bisa dipegang oleh mereka yang sudah menjadi guru (berasal dari guru), namun di bagian karakteristik dan kompetensi lulusannya masih menyebutkan jabatan pengawas pendidikan dan tidak menutup kemungkinan lulusannya dapat menjadi tenaga pendidik/pengajar.

Pada tahun berikutnya, Program Studi Administrasi Pendidikan berubah nama menjadi Manajemen Pendidikan. Hal ini didasarkan semakin luasnya penggunaan nama manajemen dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Filosofi yang diusung adalah administrasi dipandang sama dengan manajemen. Maka, penggunaan nama Manajemen Pendidikan merupakan adaptasi Jurusan Administrasi Pendidikan terhadap perkembangan keilmuan, praktis empiris dan kebijakan pengelolaan pendidikan.

Perkembangan dan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan masyarakat membawa dampak ke berbagai kehidupan, termasuk pendidikan. Perubahan ini melalui berbagai penelitian telah memberikan dampak ke sector pendidikan, birokrasi, perusahaan serta dalam penghidupan dan kehidupan.

Perubahan tuntutan masyarakat, termasuk tuntutan terhadap kebutuhan akan tenaga kerja dan kebutuhan akan memperoleh pendidikan yang merupakan dimensi demokrasi pendidikan telah membawa pada perubahan paradigma pendidikan. Tuntutan profesionalisme dalam berbagai sector termasuk sector pendidikan juga menuntut orientasi pendidikan. Pada sisi lain, terbatasnya sector formal baik yang disediakan oleh pemerintah, maupun yang disediakan oleh dunia usaha dan industri, memberikan inspirasi bagi perubahan kurikulum.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup standar: isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Salah satu standar yang merupakan bagian dari standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar tenaga administrasi sekolah/madrasah. Standar ini meliputi dan kompetensi yang merupakan acuan dalam penyiapan, pengangkatan dan pembinaan tenaga administrasi sekolah yang profesional. Atas dasar pemikiran tersebut, maka dilakukanlah perubahan kurikulum yang dituangkan dalam Kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan tahun 2009.

Tabel 2
Mata Kuliah Inti Program Program Studi Manajemen Pendidikan berdasarkan Kurikulum 2009

No.	Nama Mata Kuliah	sks Teori	sks Praktik	sks Lapangan
1	Manajemen	2		
2	Fondasi Manajemen Pendidikan	2		
3	Organisasi Pendidikan	2		
4	Komunikasi Organisasi Pendidikan*)	2		
5	Manajemen Pendidikan Kontemporer	3		
6	Manajemen Pendidikan Formal	4		
7	Manajemen Pendidikan Non Formal	2		
8	Teori dan Pendekatan Sistem	2		
9	Manajemen Perkantoran	2		
10	Manajemen Peserta Didik	2		
11	Manajemen Personalia Pendidikan	4		
12	Manajemen Perpustakaan	2		
13	Manajemen Fasilitas Pendidikan	2		
14	Manajemen Pengembangan Kurikulum	2		
15	Manajemen Keuangan	2		
16	Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini	2		
17	Manajemen Kearsipan	1	1	
18	Manajemen Pelatihan	2	2	
19	Ekonomi Pendidikan	2		
20	Kepemimpinan Pendidikan	2		
21	Perencanaan Pendidikan	2	2	
22	Analisis Data Manajemen Pendidikan		2	
23	Kebijakan Pendidikan	2		
24	Pendidikan Makro	2		
25	Sistem Informasi Manajemen	2		
26	Public Relations	1	1	
27	Kesekretariatan	1	1	
28	Korespondensi Bahasa Indonesia	1	1	
29	Korespondensi Bahasa Inggris	1	1	
30	Evaluasi Program Pendidikan	2		
31	Supervisi Pendidikan	2		
32	Penulisan Karya Ilmiah	1	1	
33	Teknologi Informasi dan Komunikasi Manajemen Pendidikan		4	
34	Teknologi Informasi dan Komunikasi Perkantoran		4	
35	Micro Leading		2	
36	PKL Manajemen Perpustakaan			2
37	PKL Manajemen Kearsipan			2
38	Seminar Pengembangan Manajemen Pendidikan		4	
39	Tugas Akhir Skripsi		6	

Memperhatikan struktur kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan tahun 2009, nampak muatan kurikulum khususnya lebih diarahkan kepada penyiapan tenaga administrasi sekolah/madrasah. Meski begitu, secara umum juga mempersiapkan mahasiswa sebagai calon manajer pendidikan pada posisi pembuat kebijakan atau *policy maker*. Selain itu pula, nampak beberapa mata kuliah yang berangkat dari dasar ilmu komunikasi dengan persentase lebih banyak.

Struktur kurikulum yang berisi mata kuliah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam silabus dan RPP. Jurusan Administrasi berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, telah tersertifikasi ISO 9001: 2008 Manajemen Mutu. Begitu pula dalam format silabus, diseragamkan dalam koordinasi Wakil Dekan I bidang akademik. Dosen memiliki keleluasaan memberikan materi dalam perkuliahannya dengan merencanakannya dalam silabus dan RPP. Kebijakan pendidikan yang menjadi pertimbangan dan materi perkuliahan, dapat dituliskan dalam silabus dan RPP tersebut.

FAKULTAS PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PADJARAN SILABUS (nama mata kuliah)			
Materi Pokok	Waktu	Tingkat Pendidikan	Mata Kuliah
.....

SILABUS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah :
 Kode Mata Kuliah :
 SKS :
 Dosen :
 Jurusan/Divisi :
 Program Studi :
 Fakultas :
 Universitas :
 Alamat :
 Kota :
 Provinsi :
 Kode Pos :
 No. Telp. :
 No. Fax :
 E-mail :
 Website :
 Nama Mata Kuliah :

Lokasi Menit Sekolah Tinggi/Universitas		
Pencapaian	Durasi Pembelajaran	Pokok Bahasan/Topik Bahasan
.....

Dosen Pembimbing :

Dosen Lain-lain/Colaborasi :

Instrumen/Alat/Bahan :

Kelebihan/Kelemahan/Keunggulan :

Widyawan/Colaborasi :
 Nama :
 NIDN :
 NIDK :
 NIDP :

Diketahui/Disetujui	LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENYUSUNAN KURIKULUM UNIVERSITAS PGRI PADJARAN	Diketahui/Disetujui
---------------------	---	---------------------

FAKULTAS PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PADJARAN RPP (nama mata kuliah)			
Materi Pokok	Waktu	Tingkat Pendidikan	Mata Kuliah
.....

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Mata Kuliah :
 Kode Mata Kuliah :
 SKS :
 Dosen :
 Jurusan/Divisi :
 Program Studi :
 Fakultas :
 Universitas :
 Alamat :
 Kota :
 Provinsi :
 Kode Pos :
 No. Telp. :
 No. Fax :
 E-mail :
 Website :
 Nama Mata Kuliah :

Materi Pokok Bahasan

Komponen Pembelajaran	Uraian Kegiatan	Metode	Media	Indikator Utama
.....
.....
.....
.....

Pembelajaran dilaksanakan di :

Dalil/Literatur/Referensi/Sumber Belajar :

Literatur pendukung :

Widyawan/Colaborasi :
 Nama :
 NIDN :
 NIDK :
 NIDP :

Diketahui/Disetujui	Diketahui/Disetujui
---------------------	-------	---------------------

Gambar 1
Format Standar Silabus dan RPP di FIP UNY

Kebijakan Publik Bidang Pendidikan sebagai Landasan Desain Kurikulum Jurusan Administrasi Pendidikan

Kebijakan pendidikan menjadi salah satu landasan dalam pengembangan kurikulum di perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Jurusan Administrasi Pendidikan secara filosofi keilmuan menjadi pengembang ilmu administrasi dalam bidang pendidikan. Oleh karenanya, kebijakan pendidikan menjadi hal pokok dalam kajian ilmu administrasi pendidikan. Kebijakan publik bidang pendidikan menjadi landasan dalam desain kurikulum yang akan diberikan kepada mahasiswa. Pada dasarnya, jenis pendidikan yang dilaksanakan pada program studi sarjana adalah pendidikan akademik. Namun, bukan berarti tidak memperhatikan hal praktis. Pokok-pokok bahasan dalam bidang kajian administrasi pendidikan menjadi lebih kaya dengan memperhatikan sudut pandang teori, ditambah dengan kebijakan pendidikan yang berlaku, serta praktis empiris di lapangan. Mahasiswa akan menjadi terbiasa dengan minimal tiga sudut pandang itu. Memahami kebijakan pendidikan dengan bekal teoritis yang kuat, serta analisis dari praktis empiris.

Seperti dikemukakan sebelumnya, kebijakan pendidikan mengalami perubahan besar sejak begulirnya era reformasi. Pemerintahan beralih kepada pola otonomi daerah. Pendidikan merupakan bidang yang pengelolaannya didesentralisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat menetapkan standar-standar minimal yang harus dipenuhi. Kebijakan pendidikan, khususnya terkait Administrasi Pendidikan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di antaranya, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada dasarnya, lingkup Standar Nasional

Pendidikan yang ditetapkan pemerintah merupakan bidang kajian dari Ilmu Administrasi Pendidikan. Dalam administrasi pendidikan, mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk dijalankan dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi bahkan melampaui standar nasional tersebut. Lingkup Standar Nasional Pendidikan itu adalah standar isi; standar proses; standar kompetensi lulusan; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian pendidikan.

Pengomunikasikan Kebijakan Publik Bidang Pendidikan dalam Perkuliahan

Pengkomunikasian kebijakan pendidikan dalam pengajaran sesungguhnya dimulai sejak struktur kurikulum disusun. Tujuan pendidikan ditetapkan dengan mempertimbangkan filosofis keilmuan dan kebutuhan masyarakat. Secara garis besar, kurikulum Manajemen Pendidikan cenderung dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah dalam sistem pendidikan nasional dalam era reformasi. Otonomi daerah mendorong desentralisasi pendidikan. Pengelolaan pendidikan diutamakan dilakukan oleh pemerintah daerah dan sekolah sebagai satuan pendidikan. Merujuk pada salah satu standar tenaga kependidikan, dalam hal ini tenaga administrasi sekolah/madrasah, telah mendorong desain kurikulum program studi S1 Manajemen Pendidikan untuk menyiapkan calon-calon tenaga tersebut.

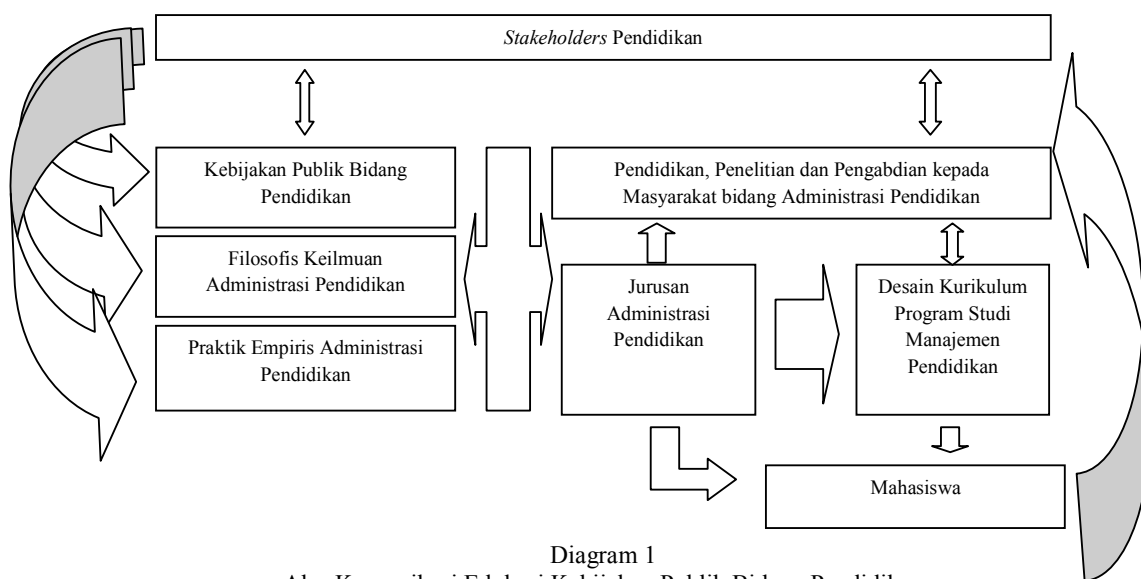


Diagram 1
Alur Komunikasi Edukasi Kebijakan Publik Bidang Pendidikan

Kebijakan pendidikan dikomunikasikan dalam pengajaran di kelas untuk memberikan wawasan bagi mahasiswa mengenai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Lebih dari itu, kebijakan pendidikan dijadikan sumber belajar yang dapat dikritisi dengan keilmuan administrasi pendidikan. Kebijakan pendidikan ditanggapi secara cerdas, kritis, dan solutif. Dosen mengomunikasikan kebijakan pendidikan dengan memperhatikan (1) potensi mahasiswa, (2) relevansi dengan karakteristik lingkungan belajar, (3) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual mahasiswa, (4) kebermanfaatannya bagi mahasiswa, (5) struktur keilmuan, (6) aktualitas, kedalaman, dan keluasan kebijakan pendidikan yang dijadikan materi pembelajaran, (7) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan (8) alokasi waktu.

Dosen didorong untuk mengaitkan pokok bahasan yang termuat dalam mata kuliah yang diampunya dengan kebijakan pendidikan dalam bidang tersebut. Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan sebagian besar telah mengomunikasikan kebijakan pendidikan yang terkait dengan bidang yang dibahas dalam mata kuliah yang diampunya. Secara hirarkial kebijakan pemerintah dimuat dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan seterusnya. Adapun pengomunikasiannya dalam pembelajaran berupa ceramah, diskusi kelas, diskusi kelompok, observasi lapangan, atau pula dalam bentuk seminar.

Memasuki tahun keempat, mahasiswa mengikuti Kuliah Kerja Nyata – Program Pengalaman Lapangan (KKN PPL). Mata kuliah ini menjadi *pre-service training* mahasiswa Manajemen Pendidikan dengan pola melaksanakan internship di lembaga pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota. Mahasiswa mengaktualisasikan ilmu yang didapat dalam perkuliahan di kampus dalam suasana nyata di lapangan. Bahkan langsung dihadapkan pada suasana implementasi kebijakan publik bidang pendidikan yang dilakukan dinas terkait. Pengomunikasian kebijakan pendidikan dalam pengajaran sebelumnya menjadi hal mutlak yang harus dilakukan.

Diskusi

Administrasi Pendidikan memiliki bidang kajian atas pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan dalam tingkat nasional, regional, dan lokal. Kebijakan publik bidang pendidikan menjadi acuan dalam pembelajaran yang kontekstual. Artinya, teori yang dikembangkan dalam ranah keilmuan administrasi pendidikan, menjadi alat analisis terhadap konteks kebijakan yang diterapkan. Dosen memberikan wawasan teoritis dan kebijakan praktis dengan harapan mahasiswa yang nantinya lulus dan bekerja memiliki daya adaptabilitas tinggi terhadap lingkungan. Lebih jauh lagi menjadi agen perubahan yang dapat menyempurnakan kebijakan pendidikan yang diterapkan.

Kebijakan pendidikan seringkali berubah dengan cepatnya. Kebijakan terdahulu masih dalam proses dipahami oleh masyarakat, kebijakan baru sudah digulirkan kembali. Misalnya, mekanisme penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Sejak 2011 pemerintah mengubah penyaluran dana BOS. Dana BOS disalurkan melalui Kementerian Keuangan langsung ke pemerintah kabupaten ataupun kota dan selanjutnya ke sekolah. Sedangkan sebelumnya dana BOS disalurkan melalui Kemdiknas ke pemerintah provinsi kemudian ke sekolah. Kebijakan ini disampaikan terutama dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Teori-teori manajemen keuangan, pembiayaan pendidikan, dan kebijakan menjadi bahan analisis terhadap kebijakan yang dijalankan. Dosen dituntut untuk selalu *update* terhadap kebijakan aktual yang terjadi.

Kebijakan pendidikan selanjutnya yang beberapa kali mengalami perubahan di antaranya adalah sertifikasi guru. Sertifikasi guru ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru dalam jabatan diberikan kesempatan mengikuti program sertifikasi melalui portofolio. Kemudian kebijakan ini diubah dengan program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Sedangkan Pendidikan Profesi Guru bagi mereka sarjana *freshgraduate* atau guru prajabatan, belum ada kebijakan pemerintah secara nasional yang dijalankan. Profesi guru kini menjadi primadona karena pemerintah menjamin pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi mereka yang tersertifikasi. Kebijakan ini dimulai dari guru dalam jabatan yang telah lama mengabdikan. Itu pun tidak melalui pendidikan profesi. Sampai kapan kebijakan ini

akan diterapkan, masih belum jelas. Menurut kaidah keilmuan, jabatan profesional hanya dapat diperoleh setelah menempuh pendidikan profesi pasca S1. Perguruan tinggi beserta organisasi profesi menentukan kelayakan seseorang untuk menyandang gelar profesi itu. Terkait tunjangan profesi yang diberikan kepada guru tersertifikasi, nampak merupakan kebijakan yang memiliki dampak sampingan. Pemerintah harus menyediakan dana yang sangat besar jika jumlah guru tersertifikasi ini terus-menerus bertambah. Jika kita melihat pada profesi lainnya, seperti dokter, psikolog, notaris, advokat, apoteker, mereka yang telah menyandang gelar profesi di bidangnya tidak otomatis mendapat tunjangan profesi dari pemerintah. Hanya mereka yang berstatus PNS yang mendapat tunjangan fungsional jabatannya. Dosen dan mahasiswa juga dituntut kekritisannya di dalam menyikapi kebijakan pendidikan ini, dan memberikan kritik membangun suatu pola pendidikan profesi, perlindungan profesi, dan penghargaannya. Kebijakan terkait tenaga pendidik ini dibahas dalam mata kuliah Manajemen Personalia Pendidikan.

Analisis kebijakan pendidikan merupakan hal yang lumrah, lazim, wajar dan sudah selayaknya dalam kajian Jurusan Administrasi Pendidikan. Pengomunikasian kebijakan pendidikan merupakan hal yang sudah menjadi kewajiban. Namun barangkali tidak begitu bagi program studi lainnya. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan berkisar antara metode penyajian, isi kebijakan, dan prediksi praktik administrasi pendidikan yang direkomendasikan.

Pertanyaan selanjutnya, berapakah persentase penyajian teori, kebijakan publik, dan praktik empiris dalam suatu perkuliahan? Merunut kepada statusnya bahwa Program Studi S1 Manajemen Pendidikan merupakan pendidikan akademik, bukan pendidikan vokasi atau profesi, maka porsi teori dalam mata kuliah inti program studi pada kurikulum 2009 tetap menjadi yang terbesar (67%), diikuti praktik (28%), dan kemudian kegiatan lapangan (5%). Jurusan Administrasi Pendidikan sebagai pengembang ilmu, bertanggung jawab untuk memberikan landasan terhadap praktik kebijakan pendidikan. Dasar teori yang diterima lulusannya menjadi landasan berpikir dalam melaksanakan kebijakan pendidikan. Isi dan bentuk kebijakan pendidikan dapat saja berubah-ubah, sesuai dengan kesepakatan politik di tingkat pemegang kekuasaan. Walau begitu, lulusan Administrasi Pendidikan dengan dasar teori yang kuat mampu beradaptasi terhadap situasi lingkungan sekitarnya.

Kesimpulan dan Saran

Kebijakan publik bidang pendidikan merupakan hal utama dalam kajian Administrasi Pendidikan. Pengomunikasian kebijakan pendidikan dalam perkuliahan di Jurusan Administrasi Pendidikan merupakan hal lumrah, biasa, wajar, dan lazim. Meski demikian, perubahan kebijakan yang terus-menerus terjadi, kondisi lingkungan dan kondisi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tentu saja berbeda-beda. Pengomunikasian kebijakan pendidikan ini terkait dengan keterampilan dasar mengajar dosen. Paradigma pengajaran di masa lalu perlu diperbaharui dengan situasi yang kekinian. Sumber informasi yang dapat diakses pada masa kini tidak berpusat pada dosen. Mahasiswa dapat dengan leluasa menghimpun dan mempelajari sumber belajar dari buku dan internet secara luas. Pengomunikasian kebijakan pendidikan dalam perkuliahan lebih cenderung sebagai upaya untuk mengasah pola pikir kritis mahasiswa atas kebijakan yang digulirkan. Selanjutnya mahasiswa yang telah lulus sangat diharapkan akan menjadi agen pembaharuan yang mampu mengkritisi dan menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa datang.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. & Yuliana, L. (2009). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Dunn, William N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. London: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs.
- Ghufran, Anik. (2010). *Dasar-dasar Komunikasi dan Keterampilan Dasar Mengajar*. Bahan Diklat PEKERTI CPNS Dosen Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hermawan, A.H. et al (2007). *Teori Mengajar*. dalam Ali, M. (ed). (2007). Ilmu dan Aplikasi Pendidikan. Bagian 1 Ilmu Pendidikan Teoretis. Bandung: Imperial Bhakti Utama.
- Irianto, Y.B. (2011). *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kurikulum Jurusan/Program Studi Administrasi Pendidikan FIP UNY Tahun 2002
- Kurikulum Jurusan Administrasi Pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan FIP UNY Tahun 2009
- Mukminan. (2010). *Desain Pembelajaran*. Bahan Diklat PEKERTI CPNS Dosen Universitas Negeri Yogyakarta.
- McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2001). *Research in Education: A Conceptual Introduction*. New York: Longman.
- Rosadi, Udi. (2010). Pola Komunikasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Diunduh dari [repository.ipb.ac.id/.../Udi%20Rosadi\(pkk\)_Makalah%20Kelompok...](http://repository.ipb.ac.id/.../Udi%20Rosadi(pkk)_Makalah%20Kelompok...) tanggal 28 September 2011.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S. & Ibrahim, R. (2007). *Teori Kurikulum*. dalam Ali, M. (ed). (2007). Ilmu dan Aplikasi Pendidikan. Bagian 1 Ilmu Pendidikan Teoretis. Bandung: Imperial Bhakti Utama.
- Umar, Dian. (2011). *Bagaimana Suatu Kebijakan Publik Dikomunikasikan?* Diunduh dari <http://www.facebook.com/topic.php?uid=39120421487&topic=6464> tanggal 28 September 2011.